

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini UMKM atau Usaha Micro Kecil dan Menengah menjadi isu yang sangat penting di negara Indonesia karena sejatinya Indonesia merupakan negara berkembang yang perekonomiannya masih banyak ditopang oleh industri dan usaha kecil. Pentingnya UMKM di negara berkembang sering di kaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran terutama dari golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan sosial dan distribusi pendapatan yang tidak merata, artinya keberadaan dan perkembangan UMKM di harapkan dapat memberikan suatu kontribusi positif yang signifikan dalam upaya penanggulangan masalah-masalah di atas. Jika di tinjau dari jumlah unit usaha yang ada di Indonesia pada tahun 2013 secara keseluruhan dari 57,900 juta unit usaha yang ada sebesar 57,895 juta atau (99,99 %) merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menyadari realitas ini memfokuskan pengembangan di sektor UMKM merupakan langkah yang sangat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat dan secara otomatis akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Peran UMKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena berdasarkan data dari departemen koperasi sektor UMKM menyumbang 60% dari PDB dan

menampung 97% tenaga kerja. Namun terlepas dari potensi tersebut UMKM di Indonesia masih mengalami kendala dalam perkembangannya.

Melihat kenyataan di atas harus ada lembaga keuangan yang mengakomodasi kebutuhan UMKM, perbankan sebagai lembaga keuangan faktanya lebih terfokus pada penyaluran kredit di sektor korporasi atau usaha-usaha besar dari pada UMKM, Bank Indonesia (BI) mencatat pangsa kredit UMKM terhadap total keseluruhan kredit perbankan pada 2016 sebesar 20,3 % sedangkan 70,7% di salurkan untuk korporasi dan proyek usaha besar yang notabene lebih menguntungkan bagi perbankan, sedangkan sektor UMKM sendiri lebih banyak di akomodir oleh lembaga keuangan mikro yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan UMKM yang di lakukan oleh lembaga keuangan sebenarnya belum di rasa cukup jika hanya sebatas penyaluran modal usaha karena ternyata permasalahan UMKM begitu kompleks, bukan hanya aspek finansial atau modal saja tetapi juga terdapat beberapa kendala di bidang manajerial seperti pengelolaan usaha, pemasaran, teknologi dan lain-lain. Beberapa UMKM yang sudah memperoleh kredit modal pun kadang masih mengalami masalah dalam perkembangan usahanya, hal ini terjadi karena lemahnya sistim manajerial dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki yang mengakibatkan mereka belum siap memasuki ranah persaingan usaha yang semakin maju. Untuk mengatasi permasalahan di atas harus ada program penyaluran dana yang di barengi dengan upaya pendampingan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan tujuan usaha yang di jalankan akan semakin maju dan berkembang.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta dalam upaya membina dan mengembangkan UMKM menjadi pelaku usaha yang profesional dan berdaya saing tinggi. Sejarah mencatat berbagai program pengembangan UMKM seperti Bimas (Bimbingan Masyarakat) tahun 1967, Kredit

Investasi Kecil (KIK) tahun 1975, Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) tahun 1982, Kredit Kelayakan Usaha (KKU) tahun 1990 sampai program yang paling baru yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemudian program pendampingan UMKM juga sudah di upayakan pemerintah lewat kebijakan Bank Indonesia (BI). Setyobudi (2007:6) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa Bank Indonesia membuat program guna penguatan lembaga pendamping UMKM melalui peningkatan capacity building dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM, upaya yang dilakukan antara lain pelatihan-pelatihan kepada lembaga pendamping UMKM dengan mendirikan Pusat Pengembangan Pendamping UKM (P3UKM). Namun karena beberapa masalah akhirnya P3UKM tidak lagi di lanjutkan dan tugasnya di lanjutkan oleh beberapa lembaga swadaya dan pendidikan. Pentingnya peran pendampingan usaha di rasakan oleh beberapa UMKM yang terlibat dalam program-program pendampingan yang dijalankan seperti program PUSPA (Pendampingan UMKM Syari'ah oleh Akademisi dan Praktisi) 2016, sebagaimana yang di ungkapkan Andrian (2017:11) bahwa UMKM yang mengikuti program PUSPA merasa terbantu dengan adanya program tersebut, tingkat kepuasan peserta dalam peningkatan kemampuan usaha selama proses pendampingan cukup tinggi dan pasca proses pendampingan memberikan efek positif dalam perkembangan usaha UMKM.

Sedangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri berdasarkan data dinas koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah usaha kecil dan menengah berdasarkan skala usaha pada tahun 2017 sebesar 248.217 usaha. sejumlah UMKM tersebut terdiri dari beberapa sektor usaha yaitu perdagangan, pertanian dan non pertanian.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta

Data	2015	2016	2017
Jumlah UKM berdasarkan Jenis Usaha	230.047	238.619	248.217
Aneka Usaha	49.923	51.780	54.649
Perdagangan	65.610	68.054	69.486
Industri Pertanian	62.519	64.857	64.523
Industri Non Pertanian	51.995	53.928	59.559

Perkembangan UMKM di Yogyakarta tergolong pesat terbukti dari data perkembangan UMKM dari tahun ke tahun terus meningkat. Dari banyaknya UMKM tersebut membuktikan bahwa DIY merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan potensi usaha yang sangat baik, namun ternyata besarnya potensi tersebut juga di barengi dengan beberapa kendala terkait masalah umum UMKM. Beberapa masalah berkaitan dengan permodalan dan akses pembiayaan terhadap perbankan, dari jumlah UMKM yang terus mengalami peningkatan saat ini sebanyak 69% UMKM khususnya di Kota Yogyakarta belum mengakses layanan keuangan perbankan. Kemudian masalah lain adalah lemahnya manajemen sumber daya manusia sehingga kebanyakan masih belum maksimal dalam menjalankan usahanya, Maka dari itu, di sini UMKM tidak hanya membutuhkan bantuan dari segi keuangan tetapi juga bimbingan pengembangan yang berupa pemberian fasilitas, pembinaan, pendampingan, dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing pada UMKM. Untuk menunjang perkembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan peran pemerintah saja, di sisi lain sektor swasta atau lembaga keuangan juga bertanggung jawab dalam melayani setiap kebutuhan dari pelaku UMKM yang bisa di realisasikan dengan penyaluran modal kerja secara optimal dan berorientasi pada perkembangan dan pemberdayaan usaha.

Dalam penelitian ini akan di fokuskan pada pemberdayaan yang di jalankan oleh lembaga keuangan mikro syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berorientasi pada perkembangan dan juga pemberdayaan usaha anggotanya adalah koperasi syariah/BMT. Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang terdiri dari 2 istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil, baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluan dana non profit seperti zakat, infak, dan sodaqah sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat komersil.

Dalam pengelolaanya BMT menggunakan sistim keuangan yang berdasarkan prinsip syariah dengan produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil, dengan adanya BMT pelaku usaha kecil yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan akan terfasilitasi dalam penyediaan kebutuhan modal. BMT juga memiliki landasan filosofi, yaitu BMT lebih berorientasi pada pemberdayaan sehingga terjalin kemitraan yang hakiki antara BMT dengan anggota. Mengingat bahwa “ Salah satu peran BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, BMT harus bersifat aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan” (Nurul Huda dan Heykal,2010:364). Kemudian peran BMT adalah juga melepaskan ketergantungan masyarakat kepada rentenir, masyarakat yang masih tergantung pada rentenir di sebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Pembiayaan yang di berikan BMT kepada anggotanya di harapkan mampu menyokong perkembangan usaha masyarakat dan menaikkan tingkat produktifitas usaha, namun pemberian modal berupa dana saja tidak cukup melainkan harus di imbangi dengan proses pendampingan usaha dan pengaplikasian prinsip syariah di dalamnya dengan

begitu setiap anggota yang telah mendapat pembiayaan oleh BMT insyaallah akan terjamin usahanya dan menjadi berkah.

Dengan di lakukanya penelitian ini penulis berkeinginan agar sektor UMKM dapat terbantu dengan memaksimalkan peran pendampingan usaha melalui lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu BMT yang ada di Yogyakarta adalah BMT BIF, BMT BIF merupakan BMT yang telah lama berdiri di daerah istimewa Yogyakarta serta mem punyai beberapa cabang atau kantor kas yang tersebar di beberapa wilayah sehingga sangat cocok untuk di jadikan tempat penelitian. Kehadiran BMT BIF sebagai lembaga keuangan mikro syariah menjadi sangat penting guna meyadarkan masyarakat akan pentingnya prinsip syariah dalam bermuamalah, dengan memberikan jasa layanan produk keuangan syariah kepada masyarakat dan pelaku usaha kecil BMT juga berkontribusi dalam upaya memberdayakan pelaku UMKM .

Dan berdasarkan latar belakang di atas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PERAN BMT DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MELALUI POLA PENDAMPINGAN USAHA** “

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Seperti apa bentuk pemberdayaan UMKM yang di lakukan oleh BMT Bina Ikhsanul Fikri (BIF)?
2. Bagaimana bentuk pola pendampingan usaha anggota yang di lakukan BMT Bina ikhsanul Fikri (BIF)?

3. Bagaimana dampak/pengaruh pendampingan yang di lakukan BMT terhadap perkembangan usaha UMKM anggota BMT Bina Ikhsanul Fikri (BIF)?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka penulis perlu membuat batasan masalah yang akan di teliti yaitu penelitian ini di fokuskan pada Pemberdayaan UMKM yang di realisasikan lewat peran pendampingan usaha oleh BMT BIF dalam rangka mendorong perkembangan dan juga kelangsungan usaha yang di jalankan oleh anggota.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas ,maka :

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya/peran BMT BIF dalam memberdayakan usaha anggotanya lewat program-program yang di jalankan.
2. Mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pola pendampingan usaha yang telah di lakukan oleh BMT BIF terhadap anggotanya
3. Mengetahui dampak dari upaya pendampingan yang di lakukan BMT BIF bagi perkembangan usaha UMKM.

E. Manfaat Penelitian

Temuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu:

1. Memberikan kajian tentang pola pemberdayaan UMKM yang di lakukan oleh BMT BIF. Dalam penelitian ini terdapat informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pola pendampingan usaha bagi UMKM sehingga di harapkan dapat di jadikan salah satu sumber literasi dan informasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait (BMT, mahasiswa dan masyarakat umum) khususnya tentang pemberdayaan UMKM di Yogyakarta
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan keilmuan, seperti dalam penelitian yang dilakukan dimasa depan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, direplikasi kembali maupun dijadikan sebagai pembanding referensi penelitian yang baru.